



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IRMA RUSTINI A.
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 809036

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.531.281.095

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 987.330.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 517 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 193.495.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 31.200.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 31.200.000
5. Tanah Seluas 1829 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 149.978.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 138.078.095

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 90.900.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B 1C AT (BEAT) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 245.990**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.622.427.085



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.622.427.085

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.